

PUBLIKASI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022



“PROGRAM PANCAKARSA TETAP MENJADI PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR, SEKRETARIAT DAERAH MEWUJUDKANNYA MELALUI PROGRAM NYATA, AKUNTABEL DAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN PENGOORDINASIAN YANG OPTIMAL KEPADA SELURUH PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOGOR”



**Drs. H. Burhanudin, M.Si.
SEKDA KABUPATEN BOGOR**

Pasca pandemi Covid-19 selama kurang lebih 2 tahun dan walaupun sampai saat ini masih berlangsung dimana Kabupaten Bogor berada pada PPKM level 1 sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/181/Kpts/Per-UU/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 COVID-19 di Kabupaten Bogor 7 Juni 2022 s.d 4 Juli 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian Visi, Misi Kabupaten Bogor dan Target kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”. Dimana Visi dan Misi ini kemudian dijabarkan dalam Panca Karsa yaitu Lima Tekad/cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Mencerdaskan Bogor, Mensehatkan Bogor, Memajukan Bogor, Membangun Bogor, dan Membuat Bogor Lebih Berkeadaban.

Dalam mewujudkan Program Pancakarsa yang tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bogor melalui program nyata, akuntabel dan berkesinambungan dengan melakukan pengkoordinasian yang optimal kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor, oleh karena itu dalam mewujudkannya Sekretariat Daerah telah menjalankan Program/Kegiatan di setiap lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum dengan Program/Kegiatan sebagai berikut :

I. LINGKUP ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, DPMD, DISDUKCAPIL, BANKESBANGPOL, DINSOS, DISDAMKAR, DINKES, DISPORA, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR aspek Penataan Ruang, DPKPP aspek Pertanahan, DISBUDPAR, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

A. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1. Kegiatan Administrasi Pemerintahan

- a. Kegiatan Fasilitasi Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa Penyusunan Regulasi, Rapat Koordinasi Tim Penerapan SPM, Bimbingan Teknis, serta Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM secara berkala



- b. Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024



c. Fasilitasi Penyelenggaraan Rakernas XIV dan HUT APKASI ke-22



d. Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2022



e. Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Perizinan ke Kepala DPMPTSP



f. Penyusunan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan ke Camat



g. Fasilitasi Rakor Penataan dan Penertiban Kawasan Lingkar Kota Cibinong dan Bawah Flyover Cileungsi



2. Kegiatan Administrasi Kewilayahan

Kegiatan Kunjungan Kerja Bupati dan wakil Bupati Bogor dalam rangka Bogor Keliling / Saba Desa tahun 2022, dari target 20 Kecamatan Yang sudah Terlaksana sudah 11 Kecamatan sampai dengan bulan September tahun 2022.



Kecamatan Cariu
19 Januari 2022



Kecamatan Cisarua
26 Januari 2022



Kecamatan Leuwisadeng
03 Februari 2022



Kecamatan Pamijahan
21 Maret 2022



Kecamatan Tenjolaya
31 Maret 2022



Kecamatan Ciampea
21 Maret 2022



Kecamatan Gunungsindur
27 Juli 2022



Kecamatan Citeureup
11 Agustus 2022



Kecamatan Cijeruk
30 Agustus 2022



Kecamatan Tamansari
13 September 2022



Kecamatan Sukaraja
19 Oktober 2022

3. Kegiatan Otonomi Daerah

LPPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

- I. Dasar penyusunan LPPD Tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Pelaporan LPPD disampaikan kepada Pemerintah melalui Kemendagri 1 tahun 1 kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- II. Penyusunan LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 dilakukan oleh Tim Penyusun LPPD yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 130.04/137/Kpts/Per-UU/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor.
- III. Penyampaian LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 telah dilakukan melalui sistem informasi elektronik dari kemendagri pada tanggal 29 Maret 2022 dan disusun dalam Buku LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 yang memuat laporan sebagai berikut:
 - a. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan;
 - c. Laporan penerapan standar pelayanan minimal.
 Penyampaian data kinerja dalam LPPD tersebut telah melalui tahapan verifikasi atau review oleh APIP (Inspektorat Kabupaten Bogor) yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD. Selain dari penyampaian melalui sistem informasi Kemendagri LPPD juga dipublikasikan dalam bentuk Ringkasan LPPD pada tanggal 31 Maret 2022.
- IV. Untuk menyempurnakan LPPD telah dilakukan evaluasi oleh Tim daerah Provinsi Jawa Barat Pada tanggal 18 s.d 21 Juli 2022 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 6 capaian kinerja makro, 32 urusan pemerintahan daerah, dan 5 penunjang urusan.
- V. Tahapan akhir yaitu evaluasi oleh Tim Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 September 2022 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 6 capaian kinerja makro, 32 urusan pemerintahan daerah, dan 5 penunjang urusan dengan hasil tidak ditemukan data ekstrim atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah penyusunan LPPD. Berikut ini data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah :

V.1. Angka Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,40	70,60	0,28%
2	Angka Kemiskinan	7,69%	8,13%	0,44%
3	Angka Pengangguran	14,29%	12,22%	-2,07%
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,77%	3,55%	5,32%
5	Pendapatan Per kapita	Rp. 43.512.751,99	Rp. 45.273.778,60	4,05%
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,381	0,396	1,5%

V.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIA N KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	Pendidikan	1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	42,655	Disdik Kab. Bogor	
		2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,573	Disdik Kab. Bogor	
		3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	84,868	Disdik Kab. Bogor	
		4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Disdik Kab. Bogor	
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,091	Dinkes Kab. Bogor	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	72,414	Dinkes Kab. Bogor	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,028	Dinkes Kab. Bogor	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	89,168	Dinkes Kab. Bogor	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,412	Dinkes Kab. Bogor	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	81,389	Dinkes Kab. Bogor	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73,006	Dinkes Kab. Bogor	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar	94,486	Dinkes Kab. Bogor	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	85,121	Dinkes Kab. Bogor	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	69,807	Dinkes Kab. Bogor	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,366	Dinkes Kab. Bogor	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	81,382	Dinkes Kab. Bogor	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	36,323	Dinkes Kab. Bogor	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	101,987	Dinkes Kab. Bogor	
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,032	DPUPR Kab. Bogor	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	DPUPR Kab. Bogor	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	48,617	DPUPR Kab. Bogor	Nilai tidak dapat dihitung

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIA N KINERJA	SUMBER DATA	KET
						karena pembagi = 0
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	71,513	DPUPR Kab. Bogor	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	71,395	DPUPR Kab. Bogor	
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	95,533	DPUPR Kab. Bogor	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86,632	DPUPR Kab. Bogor	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	93,00	DPUPR Kab. Bogor	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	DPUPR Kab. Bogor	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	54,563	DPKPP Kab. Bogor	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	-	DPKPP Kab. Bogor	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	34	DPKPP Kab. Bogor	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,695	DPKPP Kab. Bogor	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	DPKPP Kab. Bogor	
5	Trantibumlinmas	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP Kab. Bogor	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	74,359	Satpol PP Kab. Bogor	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	4.538.061	BPBD Kab. Bogor	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	417.000	BPBD Kab. Bogor	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	74.084	BPBD	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	DAMKAR	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,00	DAMKAR	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	14,691	Dinas Sosial Kab. Bogor	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIA N KINERJA	SUMBER DATA	KET
			(indikator SPM)			
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	2,7		
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	11,928	Disnaker Kab. Bogor	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,031	Disnaker Kab. Bogor	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	65,248	Disnaker Kab. Bogor	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	8,584	Disnaker Kab. Bogor	
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provins	42,745	Disnaker Kab. Bogor	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	30,268		
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,006		
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,614		
9	Pangan	1	Presentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	26,737	DKP Kab. Bogor	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	DPKPP Kab. Bogor	
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	84,603		Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100		
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-		Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-		Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100		
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	59,26	DLH Kab. Bogor	
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	43,603		
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin	7,097		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIA N KINERJA	SUMBER DATA	KET
			lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	100	Disduk Capil Kab. Bogor	
		2	Presentasi Anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	39,151		
		3	Kepemilikan akta Kelahiran	95,217		
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	15,278		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-	DPMD Kab. Bogor	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	19,048	DPMD	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,46	DP3AP2KB Kab. Bogor	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,253		
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	13,616		
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,7	Dishub Kab. Bogor	
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,58		
16	Komunikasi Informasi, Statistik, Persandian	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Diskominfo Kab. Bogor	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70	Diskominfo Kab. Bogor	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78,57	Diskominfo Kab. Bogor	
	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100		
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		
	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	47,907	Diskominfo Kab. Bogor	
17	Koperasi dan Usaha Kecil	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	9,837	Diskop UKM Kab. Bogor	
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0,199	Diskop UKM Kab. Bogor	
18	Penanaman Modal		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	8,04	DPMPPTSP Kab. Bogor	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,325	Dispورا Kab. Bogor	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,873	Dispورا Kab. Bogor	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	141,00	Dispورا Kab. Bogor	
20	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	35,714	Disbudpar Kab. Bogor	
21	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca	47,77	DAP Kab. Bogor	

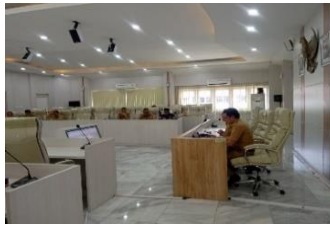
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIA N KINERJA	SUMBER DATA	KET
			masyarakat			
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	43,06	DAP Kab. Bogor	
22	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	85,44	DAP Kab. Bogor	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	86,11	DAP Kab. Bogor	
23	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	127.080,14	Disnakan Kab. Bogor	
24	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-95,691	Disbudpar Kab. Bogor	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	46,383	Disbudpar Kab. Bogor	
		3	Tingkat hunian akomodasi	39,506	Disbudpar Kab. Bogor	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,36	Disbudpar Kab. Bogor	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7,61	Disbudpar Kab. Bogor	
25	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	7,226	Distanhorbun Kab. Bogor	
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-	Disnakan Kab. Bogor	
26	Kehutanan			-	DLH Kab. Bogor	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
27	ESDM	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-	DPMPSTP	Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0
28	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	82,865	Disdagin Kab. Bogor	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	76,811		
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	99,386	Disdagin Kab. Bogor	
29	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0,821	Disdagin Kab. Bogor	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	75	Disdagin Kab. Bogor	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIA N KINERJA	SUMBER DATA	KET
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	90,323	Disdagin Kab. Bogor	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Disdagin Kab. Bogor	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota	100	Disdagin Kab. Bogor	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	31	Disdagin Kab. Bogor	
30	Transmigrasi		Tidak ada IKK Outcome	-	Disnaker Kab. Bogor	

B. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

a. Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023



b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bogor



c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan kepada Peserta Didik Miskin Jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bogor Tahun 2022



2. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Penetapan

a. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan :

TAHUN	NO	JENIS PRODUK HUKUM	NOMOR PENETAPAN	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN
2022	1	PERATURAN DAERAH			
	2	PERATURAN BUPATI	TAHUN 2022 NOMOR 1	Pedoman Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah , Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penenrangan yang dihasilkan sendiri dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor	3-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 2	Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2021 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor	3-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 3	Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2022 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor	3-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 4	Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja	4-Jan-2022
			TAHUN 2021 NOMOR 5	Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 6	Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 7	Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 8	Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 9	Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 10	Pembentukan, Organiasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 11	Pembentukan, Organiasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 12	Pembentukan, Organiasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 13	Pembentukan, Organiasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 14	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 15	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	4-Jan-2022

			TAHUN 2022 NOMOR 16	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 17	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 18	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 19	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 20	Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 21	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Usaha Kecil Menengah	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 22	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 23	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 24	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 25	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 26	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 27	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 28	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 29	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 30	Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 31	Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022	4-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 32	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 33	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas Perikanan dan Peternakan	5-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 34	Balai Penyuluhan Pertanian	5-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 35	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	5-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 36	Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang dilanjutkan di Tahun Anggaran Berikutnya	6-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 37	Penyuluh Pertanian Swadaya	18-Jan-2022
			TAHUN 2022	Pengelolaan Keuangan BLUD	

			NOMOR 38		
			TAHUN 2022 NOMOR 39	Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kondisi Kerja dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah	20-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 40	Pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana	20-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 41	Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bogor	21-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 42	Manajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bogor	24-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 43	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bogor yang Menerapkan PPK BLUD secara Penuh	24-Jan-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 45	Gerakan Literasi Daerah	2 Februari 2022
			TAHUN 2022 NOMOR 46	Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah	2 Februari 2022
			TAHUN 2022 NOMOR 47	Kabupaten Layak Anak	17 Februari 2022
			TAHUN 2022 NOMOR 48	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bogor	23 Februari 2022
			TAHUN 2022 NOMOR 49	Pengelolaan Zakat Profesi Infaq dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor	23 Februari 2022
			TAHUN 2022 NOMOR 50	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022	1 Maret 2022
			TAHUN 2022 NOMOR 51	Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8 Maret 2022
			TAHUN 2022 NOMOR 52	Penyelenggaraan Perpustakaan	8 Maret 2022
			TAHUN 2022 NOMOR 53	Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana	25 Maret 2022
			TAHUN 2022 NOMOR 55	Parsial I	25 Maret 2022
			TAHUN 2022 NOMOR 56	Target Triwulan	30 Maret 2022
			TAHUN 2022 NOMOR 57	Pemberian Penghapusan Sanksi Pajak Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2018 Sampai dengan Tahun Pajak 2021 serta Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2022 dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Virus Corona Disease 2019 di Kabupaten Bogor	1-Apr-2022

			TAHUN 2022 NOMOR 58	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerimaan Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022	20-Apr-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 59	Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022	20-Apr-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 60	Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor	20-Apr-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 61	Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B	20-Apr-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 62	Pemberian Beras oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bogor	20-Apr-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 63	Tata Cara Pembagian, Penetapan Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022	22-Apr-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 64	Parsial II	20-Jun-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 65	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023	7-Jul-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 66	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023	22-Jul-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 67	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	5-Aug-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 68	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	19-Aug-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 69	Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa	6-Sep-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 70	Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022	7-Sep-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 71	Penetapan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor	16-Sep-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 72	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Triwulan Tahun Anggaran 2022	29-Sep-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 73	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda Berprestasi	29-Sep-2022
			TAHUN 2022 NOMOR 74	Kode Etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bogor	29-Sep-2022




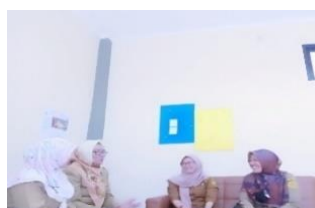

- b. RAPERDA DALAM PROSES PENGUNDANGAN KARENA MENUNGGU PERSETUJUAN PENANDATANGANAN RAPERDA DARI KEMENDAGRI DAN PROVINSI JAWA BARAT:**
- 1) Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
- c. RAPERDA DALAM PROSES PENGUNDANGAN KARENA MENUNGGU NOMOR REGISTER DARI PROVINSI JAWA BARAT:**
- Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. RAPERDA MASIH DALAM PROSES MENUNGGU PERSETUJUAN REKOMENDASI DARI DPRD SEBELUM DIUNDANGKAN:**
- 1) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
 - 2) Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

- e. RAPERDA MASIH DALAM PROSES EVALUASI PROVINSI JAWA BARAT:
Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- f. RAPERDA YANG MASIH DALAM PROSES PEMBAHASAN DENGAN DPRD:
 - 1) Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - 2) Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;




3. Kegiatan Dokumentasi dan Informasi

a. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SERTA PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Tujuan : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Produk Hukum Daerah serta penyebaran Produk Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Camat, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan dalam rangka menyebarkan Produk Hukum Daerah berupa cetakan buku Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pedoman aturan yang masih berlaku.

No	Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Perihal	Dokumentasi
a.	DRAMAGA	7-6-2022	Keputusan Camat Dramaga Nomor: 900/03-Kec. Dramaga tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
	CIAWI	10-6-2022	Keputusan Camat Ciawi Nomor: 147/13/Kpts/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Penelitian Permohonan Pencairan Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022	
b.	CISARUA	14-6-2022	Keputusan Camat Cisarua Nomor: 440/019 Tahun 2021 tentang Perubahan SK Camat Nomor 027/03/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal-Posyandu) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Tahun 2021	
c.	MEGAMENDUNG	15-6-2022	Keputusan Camat Megamendung Nomor: 027/11/Kpts/III/ 2022 tentang Perubahan SK Camat Nomor 027/03/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Langsung	
d.	CIOMAS	16-6-2022	Keputusan Camat Ciomas Nomor: 045/ 21 /Kpts/Kec.Ciomas/IV/ 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kearsipan pada Kecamatan Ciomas	

e.	CARINGIN	20-6-2022	Keputusan Camat Caringin Nomor: 240/9/Kec. Caringin/VI/2021 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Masagi Kecamatan Caringin Masa Bakti 2021-2026	
f.	TENJOLAYA	1-7-2022	Keputusan Camat Tenjolaya Nomor: 138/011/Kec./II/2022 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Operator Sistem Informasi Perencanaan Kepegawaian (Simpeg) Kecamatan Tenjolaya	
g.	PARUNG PANJANG	25-7-2022	Keputusan Camat Parung Panjang Nomor: 469.1/098/Kpts/Ipj/Kec.Parung panjang/2021 tentang Memberikan Izin Pemakaman Jenazah Atas Nama Saudara Yayan Haryana di Pemakaman Umum Gorowong Milik Pemerintah Kabupaten Bogor terletak di Desa Gorowong Kecamatan Parung Panjang	
h.	RANCABUNGUR	27-7-2022	Keputusan Camat Rancabungur Nomor: 147/05 /Kpts/V/2022 tentang Pembentukan Tim Penelitian Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022	
i.	CIAMPEA	3-8-2022	Keputusan Camat Ciampea Nomor: 421.1/ /Kpts/VI/2022 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Salman Alfarisi	
j.	LEUWILIANG	10-8-2022	Keputusan Camat Leuwiliang Nomor: 141.1/12/Kpts/VII/2022 tentang Pengangkatan Sdr. Asep Ruhiyat Sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Puraseda	
K	KEMANG	18-8-2022	Keputusan Camat Kemang Nomor 003/20/Kpts/VIII/2022 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Masyarakat atau kelompok Masyarakat atau Instansi Pemerintahan Berprestasi Dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke 77 Tahun	

			2022	
L.	BABAKANMADANG	23-8-2022	Keputusan Camat Babakan Madang Nomor 019.6/050/Kpts/IS/U/K ec. Babakan Madang/2022 tentang Pemberian Izin Reklame Luar Ruang Atas Nama PT. Rumah Mebel Nusantara di IKEA Jl. MH. Thamrin Sentul City	
m.	LEUWISADENG	24-8-2022	Keputusan Camat Leuwisadeng Nomor 658/41/Kpts/VII/2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat Masa Bakti 2021-2026	
n.	BOJONGGEDE	25-8-2022	Keputusan Camat Kemang Nomor 140/14/Kpts/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Penelitian Permohonan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2022	
o.	PARUNG	30-8-2022	Keputusan Camat Parung Nomor 420/03/Kec. tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Nurul Fiqih Desa Iwul	
p.	CIGUDEG	1-9-2022	Keputusan Camat Cigudeg Nomor 019.6/ / Kpts/IS/U/Kec.Cgd/202 1 tentang Izin Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul Di luar Ruang Atas Nama Abdullah PT.Sampoerna Di Desa Cigudeg	
q.	JASINGA	1-9-2022	Keputusan Camat Jasinga Nomor 421.10/59/Kpts/ Penkes/V/2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Amirul Mu'minin Kp.Nanggung RT/Rw 004/003 Desa Tegalwangi	
r.	SUKAJAYA	15-9-2022	Keputusan Camat Sukajaya Nomor 451.15/90/Kpts/IX/202 2 tentang Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan Sukajaya	

b. Konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor di Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi



Tujuan : Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Bogor.
 Hari/Tanggal : Rabu/21 September 2022
 Tempat : Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan

c. Konsultasi ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional



Tujuan : Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
 Hari/Tanggal : Rabu/5 Oktober 2022
 Tempat : Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional

C. BAGIAN KERJASAMA DAN BANTUAN HUKUM

Kegiatan Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah yang telah dilaksanakan penandatangananannya :

JENIS	2021	PEMERINTAH	PIHAK KETIGA
KB	33 DOKUMEN	12	21
PKS	93 DOKUMEN	15	78
Jumlah	126 DOKUMEN	27	99

JENIS	JANUARI S/D SEPT 2022	PEMERINTAH	PIHAK KETIGA
KB	37 DOKUMEN	6	31
PKS	85 DOKUMEN	10	75
Jumlah	122 DOKUMEN	16	106

D. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Kegiatan Bina Mental Spiritual

a. Kegiatan Program Pembinaan Tahfid Al-Qur'an Tahun 2022



b. Mengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (19-25 Juni 2022)



c. Melaksanakan Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke 44 Tingkat Kabupaten Bogor Tahun



d. Peringatan Nuzulul Qur'an Ramadhan 1443 H/2022M berlokasi di Kecamatan Tenjo (20 April 2022/ 1443 H)



- e. Pelaksanaan Tarawih Keliling di 40 Kecamatan secara serentak (23 April 2022 M/ 1443 H)



- f. Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Kab. Bogor Tahun 2022 Dokumentasi (2 Juni -19 Juli 2022 M/ 1443 H)



- g. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2022 M/1443 H (Tabligh Akbar) (26 September 2022)



- h. Kegiatan Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan dengan Tema "Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka pada Masa PPKM sebagai upaya mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan kondusif di Kabupaten Bogor (29-30 September 2022)



2. Kegiatan Kesejahteraan Sosial

- a. Kegiatan Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan dengan Tema "Revitalisasi UKS/M Melalui Sekolah Sehat Untuk Mewujudkan Anak Sehat, Kuat dan Cerdas Berkarakter" (30-31 Agustus 2021)



- b. Pembahasan dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bogor, yang dihadiri oleh TPPS Kabupaten Bogor, Setwapres, Word Bank, Bappenas dan Bangda Kemendagri (25 Agustus 2022)



- c. Rapat Pembahasan Permohonan Pembangunan Gedung SMA Negeri 3 Cileungsi



- d. Audensi dengan DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kabupaten Bogor (23 Agustus 2022)



- e. Audensi dengan DPD Jamkes Watch Kabupaten/Kota (26 Juli 2022)



3. Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat

- a. Kegiatan Hari Jadi Bogor yang ke 540



- b. Kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke 73



- c. Kegiatan Hari Olahraga Nasional



II. LINGKUP ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : DLH, DPMPSTP, DISHUB, DISBUDPAR aspek Pariwisata, DISTANHORBUN, DISKANAK, DISKOPUKM, DISDAGIN, DKP, DISNAKER, DPUPR aspek Pekerjaan Umum, DPKPP aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman, BUMD, BLUD dan instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

A. BAGIAN PEREKONOMIAN


1. Kegiatan Pembinaan BUMD dan BLUD









Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dengan sub kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Adapun sub kegiatan yang telah dilaksanakan :


No	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pengurus BUMD Kabupaten Bogor dalam rangka Sosialisasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).	
2.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Seluruh Pengurus BUMD, dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/ Rencana Bisnis Bank (RBB).	
3.	Kegiatan Seleksi Anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT LKM Bogor. Pelaksanaan Tahapan Seleksi Anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT LKM Bogor dilaksanakan pada bulan juli 2022 sampai dengan agustus tahun 2022, adapun tahapan pelaksanaan seleksi tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.	 
4.	Fasilitasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD Kabupaten Bogor, diantaranya : - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Laporan Keuangan BUMD tahun buku 2021 yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Pengangkatan Direktur Operasional PT LKM Bogor Periode 2022-2027 dan Pengangkatan Anggota Komisaris PT LKM Bogor Periode 2022-2006 hasil seleksi yang dihadiri oleh Pemegang Saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten Bogor.	 
5.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan BUMD, diantaranya : • Monitoring langsung ke lapangan dan Rapat Pembahasan dengan Dinas terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan Pasar Citayam milik BUMD Pasar Tohaga dengan Pemerintah Kota Depok	

2. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dengan sub kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengendalian dan distribusi perekonomian, Adapun sub kegiatan yang telah dilaksanakan :

No	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Rapat Road Map Peta Jalan Pengendalian Inflansi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 – 2024. Pada 13 Januari 2022 dihadiri oleh Tim TPID	

2.	Ekspose PT. MNC Lido tentang Rencana Aksi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido pada tanggal 18 Januari 2022 dihadiri SKPD terkait	
3.	Expose dengan Shopee Indonesia pada Bulan Maret 2022	
4.	Peresmian Pasar Rakyat Jabar Juara Cisarua Kabupaten Bogor oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor pada tanggal 7 April 2022	
5.	Fasilitasi Bapak Presiden dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada para pedagang di Pasar Cisarua Kabupaten Bogor	
6.	Pembahasan Pengendalian Inflansi di Daerah dengan Presiden Republik Indonesia secara Hybrid di pimpin oleh Bpk Plt. Bupati Bogor pada tgl 12 September 2022 yang di hadiri oleh Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli ekonomi dan Pembangunan, Inspektur, Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Peternakan dan Perikanan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kpala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pmberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Bagian Perundang-undangan, Direktur Perumda Pasar Tohaga	
7.	<u>Kegiatan Pembahasan Perkembangan Rest Area Puncak Kabupaten Bogor</u>	
8.	Kegiatan Pembahasan Inventarisasi Rencana Program Kerja TPAKD Kabupaten Bogor Tahun 2022 dihadiri SKPD terkait	
9.	Expose PT. MNC KEK LIDO dengan Bpk Plt. Bupati Bogor, Bpk Asisten Perkonomian dan Pembangunan, Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bagian Perekonomian, unsur Badan Pendapatan Daerah	

10.	HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat Kabupaten Bogor yang dipimpin langsung oleh Plt Bupati Bogor dengan memberikan arahan mengenai Pengendalian Inflansi, Penggunaan Produk Dalam Negeri, pembelian produk lewat E-Katalog Lokal dan Permasalahan Kemiskinan Ekstrim.	
-----	--	---

3. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

a. Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Kabupaten Bogor serta evaluasi kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED)

1) Kondisi Ekonomi :

- PDRB Kabupaten Bogor dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan namun pada tahun 2020 saat terjadi puncak pandemi covid-19 mengalami penurunan sebesar **1,275.82** milyar rupiah atau **0,54** persen.
- Pada tahun 2021 setelah penurunan pandemi Covid-19 PDRB Kabupaten Bogor mengalami kenaikan sebesar **9,071,33** milyar rupiah atau **3,84** persen.

2) Laju Pertumbuhan :

- Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2016-2019 terlihat stabil namun pada tahun 2020 saat terjadi pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM darurat, LPE Kabupaten Bogor merosot tajam di angka minus **1,77%**.
- Pada tahun 2021 setelah penurunan pandemi covid-19 LPE Kabupaten Bogor naik kembali menjadi **3,48%**.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka :

- Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor tahun 2016-2019 berada pada angka yang cukup stabil sekitar **9%** namun pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 naik menjadi **14,29%** artinya ada kenaikan sebesar **5,23%** dari tahun sebelumnya.
- Pada tahun 2021 saat pandemi covid-19 menurun dan kegiatan perekonomian sudah berjalan normal tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi **12,22%** ini berarti ada penurunan sebesar **2,07%** dari tahun 2020.

4) Dampak Pandemi :

- Berbagai penurunan perekonomian berdampak ke rumah tangga, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sektor usaha dan sektor keuangan
- Persentase penduduk miskin meningkat, pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar **6,66%** menjadi **7,69%** pada tahun 2020 dan menjadi **7,61%** pada tahun 2021.
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menurun pada tahun 2019 sebesar **5,85%** menjadi **minus 1,77%** pada tahun 2020.
- Tingkat pengangguran terbuka meningkat, pada tahun 2019 tingkat pengangguran sebesar **9,06%** dan meningkat menjadi **14,29%** pada tahun 2020 dan menurun pada tahun menjadi **12,22%**.

5) Target Program Pemulihan Ekonomi Daerah :

a) Sektor Prioritas Bidang Pariwisata

- Pengembangan Destinasi Wisata Tourist Domestik (wisata alam, pedesaan, dan olahraga) dan meningkatkan kualitas ekonomi kreatif.
- Membangun Wisata Religi.
- Layanan informasi dan marketing terpadu serta paket destinasi terintegrasi berbasis digital.
- Penyelenggaraan seni budaya Kabupaten Bogor.
- Mempertahankan Geopark Nasional Pongkor yang sudah masuk ke dalam Unesco Global Geopark (UGG).
- Pembukaan kembali destinasi wisata dan event pariwisata internasional dengan menerapkan protokol kesehatan (QualityTourism).
- Pemberdayaan kelompok sadar wisata berbasis komunitas.
- Pengelolaan Cagar Budaya Daerah.

- b) Sektor Prioritas Bidang UMKM dan IKM
- Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro dengan Dunia Usaha
 - Fasilitasi Perijinan Bagi Usaha Mikro, berupa : PIRT (Perizinan Industri Rumah Tangga, PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan), Sertifikasi Halal, HAKI / Merek, OSS NIB (Nomor Induk Berusaha) dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)
 - Pengembangan Wirausaha Baru, Fasilitasi Akses Permodalan, Klinik Bisnis UMKM dan Pembuatan Katalog Digital Produk UMKM
 - Pemberdayaan Usaha Koperasi melalui Akses Permodalan, Pemasaran, Kemitraan, Klinik Konsultasi Manajemen Koperasi
- c) Sektor Prioritas Bidang Pertanian
- Fasilitasi sarana (Benih, obat-obatan, peralatan pertanian) prasarana pertanian (Irigasi tersier, irigasi pipa, damparit, RPH) .
 - Pengendalian organisme pengganggu tanaman dan akibat perubahan iklim
 - Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani
 - Pemanfaatan lahan tidak produktif .
 - Peningkatan pemasaran dan nilai tambah produk pertanian .
 - Fasilitasi perizinan usaha sektor pertanian
 - Peningkatan layanan UPT yang memproduksi bibit dan benih pertanian.
- d) Sektor Perikanan dan Peternakan
- Fasilitasi sarana (benih/bibit, pakan, peralatan) dan prasarana perikanan dan peternakan (irigasi tersier, pembenihan ikan, RPH).
 - Pengendalian bencana non alam yang bersifat zoonosis dan pengendalian penyakit ikan
 - Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pembudidaya ikan peternak
 - Pemanfaatan lahan dan perairan tidak produktif
 - Peningkatan pemasaran dan nilai tambah produk perikanan dan peternakan
 - Fasilitasi perizinan usaha sektor perikanan dan peternakan
 - Peningkatan pelayanan UPT.
 - memproduksi bibit/benih perikanan dan peternakan (untuk distribusi ke masyarakat).
- e) Sektor Ketahanan Pangan
- Optimalisasi infrastruktur pendukung ketahanan pangan.
 - Optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.
 - Pengawasan keamanan pangan di sentra produksi dan pasar-pasar.
 - Penanganan desa rawan pangan.
 - Pengawasan ketersediaan dan distribusi pangan.
 - Diversifikasi konsumsi pangan (pemanfaatan pekarangan, *family farming*).
 - Fasilitasi izin edar pangan (prima 3 dan sertifikasi PSAT).
- f) Sektor Prioritas Bidang Industri & Manufaktur
- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Penyelesaian Pembangunan Rest Area PKL Gunung Mas Puncak, Penyelesaian Pasar Cisarua, Lanjutan Revitalisasi Pasar Ciseeng, Lanjutan Pembangunan Pasar Cijeruk dan Lanjutan Pembangunan Pasar Klapanunggal).
 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus bagi Rumah Tangga Miskin (RTM).
 - Pameran Dagang Lokal (Pameran Dagang Produk IKM di CCM, AOEN dan Botani Square)
 - Fasilitasi Produk IKM yang siap ekspor melalui kerjasama dengan market place (Pameran Virtual dan Pembuatan Katalog Virtual Produk IKM).
 - Fasilitasi persyaratan administrasi bagi pelaku usaha yang siap ekspor.
 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Pembangunan Pasar Digital Bagi Produk UMKM/IKM dan Produk Lainnya termasuk Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Jasa Lainnya) yang bekerjasama dengan Marketplace.
- g) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Optimalisasi promosi dan fasilitasi calon investor.
 - Meningkatkan pelayanan investasi melalui Pembangunan MPP (Mal Pelayanan Publik) dan GPP (Gerai Pelayanan Publik).
 - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 - Fasilitasi percepatan investasi bagi industri high demand terdampak Covid- 19.



- b. Fasilitasi keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pameran Apkasi Otonomi Expo 2022 selama 3 hari dari 20 -22 Juli 2022 di Hall A dan B JCC Senayan Jakarta.



- c. Fasilitasi keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kegiatan Pameran INACRAFT 2022 di JCC Jakarta dari 23 – 27 Maret 2022 di JCC Senayan Jakarta.



- d. Pembangunan Kampung Batik New Normal di Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor



B. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Kegiatan Penyusunan Program

- a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Dramaga 2



- b. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Park and Ride di Terminal Bojonggede



- c. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Fly Over Tenjo Pencanangan Pembangunan Fly Over Tenjo oleh Menteri Perhubungan, Kementerian BUMN, Plt. Bupati Bogor, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Agung Podomoro





d. Kegiatan Perencanaan Penataan Kawasan Cibinong Science Center – Botanical Garden (CSC-BG)



e. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Tambang



2. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan

a. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2021



b. Kegiatan Rapat Koordinasi Plt. Bupati Bogor dengan Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Para Camat, Direktur RSUD, Dirut. BUMD. Tanggal 12 Juli 2022 di Ruang Serbagun I Sekretariat Daerah



c. Rapat Koordinasi Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Tanggal 8 Agustus 2022 bertempat di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah



d. Sinergi Pembangunan melalui Uji Coba dan Pelatihan Aplikasi Pembangunan, Tanggal 13 s.d 14 Juli 2022 bertempat di Camp Hulu Cai Kecamatan Ciawi



C. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa

Menaungi kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa mulai dari mempersiapkan dokumen pemilihan hingga melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Adapun jumlah paket tender yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 September 2022 adalah **679 Paket Tender** dan **36 Paket Non Tender** sehingga total keseluruhan berjumlah **715 Paket Kegiatan** yang terdiri dari 4 jenis kegiatan pengadaan yaitu:

- Pengadaan Barang 78 Paket.
- Pengadaan Konstruksi 476 Paket
- Pengadaan Konsultansi 116 Paket
- Pengadaan Jasa Lainnya 45 Paket



2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Menaungi kegiatan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa secara Elektronik dan melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi yang saat ini terdiri dari 3 program yaitu :

- Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 telah mencapai 81,17% dari 72 Perangkat Daerah.



- Sosialisasi dan Monitoring Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Rekapitulasi Pengelolaan P3DN per tanggal 13 Oktober 2022 dengan jumlah Paket PDN yang sudah tervalidasi sebanyak 9.742 Paket dengan nilai Rp. 1.134.436.600.098, Nilai TKDN Realisasi sebanyak Rp. 4.029.500.700.



- Katalog Elektronik Lokal

Pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Bogor terdapat 14 Etalase Produk dengan jumlah produk sebanyak 997 produk dan 56 penyedia dengan nilai transaksi Rp. 5.722.050.000.

No	Nama Etalase Produk	Jumlah Produk	Jumlah Penyedia
1.	Alat Tulis Kantor Kabupaten Bogor	729	14
2.	Aspal Kabupaten Bogor	31	5
3.	Bahan Material Kabupaten Bogor	58	8
4.	Bahan Pokok Kabupaten Bogor	18	1
5.	Beton Precast Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	4	2
6.	Beton Ready Mix Kabupaten Bogor	14	2
7.	Hewan Ternak Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	0	0
8.	Jasa Keamanan Kabupaten Bogor	15	5
9.	Jasa Kebersihan Kabupaten Bogor	18	4
10.	Makanan dan Minuman Kabupaten Bogor	56	9
11.	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Bogor	17	2

12.	Seragam Sekolah Kabupaten Bogor	1	1
13.	Servis Kendaraan Kabupaten Bogor	16	1
14.	Souvenir Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	20	2
Jumlah Keseluruhan		997	56



3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Menaungi kegiatan Pembinaan dan Advokasi yang terdiri atas program kerja sebagai berikut :

a. Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Saat ini Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kab Bogor telah mencapai level Proaktif dengan melengkapi 9 Variabel yang telah ditetapkan oleh LKPP yaitu :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Manajemen Pengadaan | 6. Tugas/Fungsi Kelembagaan |
| 2. Manajemen Penyedia | 7. Perencanaan SDM Pengadaan |
| 3. Manajemen Kinerja | 8. Pengembangan SDM Pengadaan |
| 4. Manajemen Risiko | 9. Sistem Informasi |
| 5. Pengorganisasian Kelembagaan | |



b. Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil Inventarisasi ASN bersertifikat PBJ Dasar dari total 72 Perangkat Daerah terdapat 915 orang dari Eselon IV, dimana sebanyak 212 orang (12%) telah mengikuti Bimbingan Teknis, sebanyak 703 orang (38%) belum mengikuti Bimbingan Teknis, sebanyak 129 orang (7%) sudah memiliki sertifikat PBJ Dasar dan 789 (43%) belum memiliki sertifikat PBJ Dasar.



c. Capaian *Monitoring Center for Prevention (MCP)* dengan beberapa Indikator penilaian sebagai berikut :

- SDM UKPBJ
Melakukan pendataan ASN bersertifikat dan memiliki SK Jafung pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari pokja pemilihan, Tim LPSE dan Tim PDA yang seluruhnya permanen ditempatkan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan tidak merangkap pada Perangkat Dinas lain
- Pelaksanaan Tupoksi
Menetapkan 10 paket strategis pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan pancakarsa, melakukan reviu perencanaan PBJ, melakukan pendataan Database Vendor dan Kualifikasi Vendor, melakukan Evaluasi Kegiatan PBJ serta melakukan rekapitulasi daftar pelaksanaan pendampingan konsultasi dan layanan sengketa kontrak (sanggahan).
- Perangkat Pendukung
Membuat SK kode Etik Pengadaan Barang/Jasa, membuat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan membuat pengajuan TPP Khusus berdasarkan risiko kerja pengadaan barang/jasa.

- Penayangan SiRUP
Membuat rekapitulasi kesesuaian SiRUP dengan Belanja Langsung pada masing-masing perangkat daerah.
- Pengendalian dan Pengawasan
Membuat laporan hasil Reviu HPS 10 Paket Strategis dengan nilai paket tertinggi, melaksanakan tindaklanjut Reviu tata Kelola PBJ dan membuat laporan tindaklanjut rekomendasi hasil reviu kinerja PBJ.



D. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

1. Kegiatan Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

- a. **SAAT INI BERSAMA BAPEDALITBANG DAN DISTANHORBUN SEDANG MELAKUKAN PENDATAAN ULANG TERKAIT LAHAN SAWAH DILINDUNGI** SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI TERBITNYA SURAT DARI DIREKTUR PENGENDALIAN HAK TANAH, ALIH FUNGSI LAHAN, KEPULAUAN DAN WILAYAH TERTENTU, KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG NO. 12/UND-700.PP.04.01/1/2022 TENTANG PENYERAHAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) DI 8 SERT SURAT KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 213/PUR.02/BID.PR TANGGAL 31 JANUARI 2022 TENTANG PERMOHONAN KLARIFIKASI LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD)
- b. MENKOORDINASIKAN PERCEPATAN PANGAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BOGOR
- c. IKUT SERTA DALAM POKJA PENYUSUNAN KLHS RTRW DAN RDTR
- d. MERUMUSKAN KEBIJAKAN TERKAIT ALOKASI DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN
- e. MENKOORDINASIKAN DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBANGUNAN BALAI BENIH IKAN DI DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG SAAT INI SEDANG DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN
- f. MEMFASILITASI DAN MENKOORDINASIKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MILENIAL KABUPATEN BOGOR
- g. MENKOORDINASIKAN PEMILIHAN DUTA PETANI MILENIAL KABUPATEN BOGOR
- h. MENGHADIRI PRA PENAS 2022 DI KABUPATEN MAROS
- i. MENGHADIRI REMBUG UTAMA, HUT KTNA DAN EXPO KTNA DI KOTA BATU DAN KABUPATEN MALANG
- j. MENGHADIRI FORUM NASIONAL (FORNAS) PUSAT PELATIHAN PENYULUH PERDESAAN SWADAYA (P4S) DI KOTA DENPASAR
- k. MENGHADIRI PRA PENAS 2022 DI KABUPATEN MAROS
Kegiatan Pra Penas 2022 dengan tema “Memantapkan Penguatan Komoditi Lokal Untuk Kemandirian Pangan” dilaksanakan di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Sabtu-Senin 25 - 27 Juni 2022. Pra Penas 2022 ini merupakan forum pertemuan pendahuluan sebelum acara Penas Petani Nelayan XVI yang direncanakan diselenggarakan pada tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat. Hadir langsung membuka rangkaian acara Pra Penas Tahun 2022 ini Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo. Kegiatan ini juga dihadiri lebih dari 5.000 peserta. Dalam rangkaian Pra Penas 2022 juga dilakukan Temu Usaha Agribisnis dan Studi Banding yang diikuti oleh peserta seluruh Indonesia, Pameran Pembangunan Pertanian dengan menampilkan produk unggulan dari masing-masing Provinsi.
- l. MENGHADIRI REMBUG UTAMA, HUT KTNA DAN EXPO KTNA DI KOTA BATU DAN KABUPATEN MALANG
Kegiatan rembug utama, Hut-KTNA, Expo KTNA dan Peluncuran Buku 50 Tahun KTNA dilaksanakan di Balai Kota Among Tani, Kota Batu dan Cafe Sawah Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Hadir secara langsung untuk membuka rangkaian acara, Menteri Pertanian RI Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional memberikan penghargaan dan apresiasi berupa Pin Emas Lencana Adhi Bakti Tani Nelayan KTNA kepada Menteri Pertanian RI atas keberhasilan dalam membangun pertanian nasional serta menjadikan Indonesia sebagai

negara swasembada beras dengan tidak melakukan impor selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2019, 2020 dan 2021.

Seluruh insan pertanian di Indonesia khususnya yang berada di bawah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah pembela bangsa ditengah krisis pangan. Pertanian merupakan sektor yang mampu tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun dalam suasana krisis, juga bisa berperan dengan baik dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional.

m. MENGHADIRI FORUM NASIONAL (FORNAS) PUSAT PELATIHAN PENYULUH PERDESAAN SWADAYA (P4S) DI KOTA DENPASAR









Rangkaian Forum Nasional (Fornas) P4S dilaksanakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) diselenggarakan pada tanggal 24 - 27 September 2022 di Kota Denpasar Bali dengan tema 'P4S sebagai pembaharu perdesaan tingkatkan ketersediaan pangan lokal melalui pemanfaatan teknologi smart farming dan pertanian regeneratif.'

Forum Nasional P4S tahun ini dilakukan secara *hybrid* (luring dan daring) dengan 1.620 peserta, terdiri dari Forum Komunikasi Nasional, Forum Komunikasi P4S Provinsi, P4S Model, dan P4S Swadaya.

n. RUMUSAN KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN :

- 1) PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG INTENSIFIKASI PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021 - 2023
- 2) KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 521/577/Kpts/PER-UU/2021 TENTANG SASARAN PRODUKSI DAN INTENSIFIKASI PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022
- 3) PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PEMBELIAN BERAS OLEH APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
- 4) KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 443/213/Kpts/Per-UU/2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK
- 5) KEPUTUSAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR (DALAM PROSES DI BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN)
- 6) KEPUTUSAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA DI KABUPATEN BOGOR (DALAM PROSES DI BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN)
- 7) KEPUTUSAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELIAN BERAS OLEH APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR (DALAM PROSES DI BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN)


No	Kegiatan	Dokumentasi
1.	RAPAT PEMBAHASAN PENGGUNAAN DANA DESA SEBESAR 20% UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI	
2.	PEMBAHASAN PERKEMBANGAN PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK	
3.	RAKOR PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN PETANI MILENIAL DAN KEBERADAAN KOSTRATANI	

4.	OPERASI BERSAMA PENGGEREBEKAN PABRIK TAHU BERFORMALIN DI PARUNG	
5.	SURVEY PRA SITE-PLAN PENGEMBANGAN BALAI BENIH IKAN (BBI) KEMANG	
6.	PENINJAUAN LAPANGAN RENCANA PEMBANGUNAN PASAR HEWAN JONGGOL	
7.	PENINJAUAN LAHAN RENCANA PEMBANGUNAN UPT PERBIBITAN TERNAK SIPAK	
8.	MENGHADIRI PRA PENAS 2022 DI KABUPATEN MAROS	
9.	PANEN PERDANA KOPI ROBUSTA DI DESA SUKAHARJA KECAMATAN SUKAMAKMUR	
10.	MENGHADIRI REMBUG UTAMA, HUT KTNA DAN EXPO KTNA DI KOTA BATU DAN KABUPATEN MALANG	
11.	MENGHADIRI FORNAS P4S DI KOTA DENPASAR	

2. Kegiatan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup

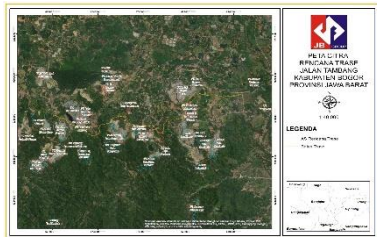
- a. KEJADIAN BENCANA LONGSOR DI AREA PERTAMBANGAN PT. BATU SAMPURNA MAKMUR DI KECAMATAN RUMPIN :
 - PENANGANAN KEJADIAN BENCANA LONGSOR DI AREA PERTAMBANGAN PT. BATU SAMPURNA MAKMUR DI KECAMATAN RUMPIN
 - PENYERAHAN PIAGAM UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PT. BATU SAMPURANA MAKMUR DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR ATAS UPAYA YANG CEPAT DAN SINGGUNG-SINGGUNG DALAM MENANGANI BERBAGAI KEWAJIBAN SOSIAL BAIK KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA DAN PERBAIKAN SARANA YANG RUSAK DI SEKITAR LOKASI BENCANA LONGSOR
- b. RUMUSAN KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN :
 - A. KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 660.1/574/Kpts/Per-UU/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL AKIBAT DAMPAK PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BOGOR
 - B. SURAT PERTIMBANGAN BUPATI BOGOR TERHADAP CALON LAHAN KOMPENSASI PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN a.n PT. WIJAYA KARYA BETON, Tbk.

No	Kegiatan	Dokumentasi
1.	PERUMUSAN SURAT PERTIMBANGAN BUPATI BOGOR TERHADAP CALON LAHAN KOMENSASI PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN A.N PT WIJAYA KARYA BETON, TBK	
2.	PENANGANAN BENCANA LONGSOR DI AREA TAMBANG PT. BATU SAMPURNA MAKMUR	 Pemasangan Sheet Pile Beton
3.	PENYERAHAN PIAGAM UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PT. BATU SAMPURANA MAKMUR PADA ACARA PANCAKARSA AWARDS	
4.	PENANGANAN PERMASALAHAN DUGAAN PENCEMARAN PT. MANDALA INTI PERSADA	
5.	PENANGANAN SAMPAH DAN LIMBAH DI SUNGAI CILEUNGSI-CIKEAS	
6.	TEMPAT PEMBUANGAN DAN PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH (TPPAS) LULUT NAMBO	

7.	MEMFASILITASI PEMBENTUKAN TIM TEKNIS FASILITASI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CISADANE (HULU), BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT REKONVASI BUMI, FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI CISADANE SERTA <i>STAKE HOLDER</i> TERKAIT	
----	--	---


c. MEMFASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOLL TAMBANG CIGUDEG – RUMPIN KABUPATEN BOGOR BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, PT. JAYA BAYA, PT. JASA SARANA SERTA *STAKE HOLDER* TERKAIT







- A. Pembangunan jalan toll khusus tambang CIGUDEG-RUMPIN didasari oleh sebagai berikut :
1. Perlunya ada jalan khusus pengangkut hasil tambang.
 2. Jalur khusus pengangkut hasil tambang tidak boleh tercampur dengan jalur aktifitas masyarakat.
 3. Jalur tambang harus mengkomodir perusahaan tambang agar penggunaannya efektif dan maksimal.
- B. Solusi dibangunnya jalan toll khusus tambang Cigudeg – Rumpin :
1. Tingginya angka kecelakaan yang di sebabkan oleh truk pengangkut hasil tambang
 2. Kemacetan yang Panjang karena bercampurnya pergerakan premier (jarak jauh) dan kegiatan sehari-hari
 3. Kerusakan jalan
 4. Permasalahan Kesehatan (ISPA) yang di akibatkan oleh debu dari jalan
 5. Kecamatan CIGUDEG-RUMPIN merupakan wilayah penghasil tambang terbesar di Kabupaten Bogor dan merupakan wilayah strategis untuk market hasil tambang di wilayah JABODETABEK.



3. Kegiatan Sumber Daya Alam Energi dan Air

- a. PENGKOORDINASIAN DAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 147/261/KPTS/PER-UU/2022 TENTANG: PENETAPAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD KEPADA DESA DI KECAMATAN PAMIJAHAN TAHUN 2022.
- b. PENGKOORDINASIAN DAN FASILITASI RINTISAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa).
- c. FASILITASI DAN PENGKOORDINASIAN RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN GAS UNTUK KEPENTINGAN RUMAH TANGGA OLEH PT. PERTAMINA GAS NEGARA (PGN) DI KABUPATEN BOGOR.
- d. RUMUSAN KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN :
 - A. PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD.
 - B. KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 147/261/KPTS/PER-UU/2022 TENTANG PENETAPAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD KEPADA DESA DI KECAMATAN PAMIJAHAN TAHUN 2022.

No	Kegiatan	Dokumentasi
1.	SOSIALISASI BADAMI BOGOR MASAGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN AKSES AIR MINUM, SANITASI AMAN DAN PERILAKU HYGIENE MENUJU BOGOR SEHAT	

2.	SOSIALISASI PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA MELALUI SKEMA KPBU	
3.	RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN JARINGAN GAS DI KABUPATEN BOGOR	
4.	KUNJUNGAN KERJA KE DINAS LINGKUNGAN HIDUP SURABAYA	
5.	KUNJUNGAN KERJA KE PT. SUMBER ORGANIK	
6.	KUNJUNGAN KERJA KE TPA BENOWO	
7.	RAPAT PEMBAHASAN PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DI KECAMATAN TAMANSARI	

III. LINGKUP ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : BAPPEDALITBANG, BKPSDM, BPKAD, DAP, DISKOMINFO dan instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

A. BAGIAN UMUM

1. Kegiatan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

NO.	KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI S.D SEPT 2022	PERSENTASE
1.	PENYEDIAAN SURAT MENYURAT			
a.	Surat Masuk	12.600 Surat	10.532 Surat	84%
b.	Surat Keluar	5.500 Surat	3.320 Surat	60%
2.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
a.	Kenaikan Pangkat	75 Pegawai	59 Pegawai	79%
b.	Kenaikan Gaji Berkala	100 Pegawai	78 Pegawai	78%
c.	Pegawai Pensiun	5 Pegawai	6 Pegawai	120%

2. Kegiatan Rumah Tangga

No	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kegiatan 11 Januari 2022 : Memfasilitasi Jamuan Rapat Koordinasi Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19	
2.	Kegiatan 25 Januari 2022 : Memfasilitasi Jamuan Kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Kabupaten Bogor.	
3.	Kegiatan 02 Februari 2022 : Memfasilitasi Jamuan Audiensi Dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman.	
4.	Kegiatan 14 Februari 2022 : Memfasilitasi Jamuan Audiensi Perwakilan Guru Kristen Dan Guru Katolik	
5.	Kegiatan 23 Maret 2022 : Memfasilitasi Jamuan Rapat OMBUDMAN.	
6.	Kegiatan 28 Maret 2022 : Memfasilitasi Jamuan Kunjungan Kerja DPRD Sumatra Barat.	
7.	Kegiatan 20 April 2022 : Memfasilitasi Jamuan Baznas Kabupaten Bogor	
8.	Kegiatan 22 April 2022 : Memfasilitasi Jamuan Launcing Buku Produktif kabupaten Bogor Edisi Tahun ke-1 2022	
9.	Kegiatan 23 Mei 2022 : Memfasilitasi Jamuan Internal Expose.	

10.	Kegiatan 23 Mei 2022 : Memfasilitasi Jamuan Rapat Masalah Pembangunan Gor Pakansari.	
11.	Kegiatan 30 Juni 2022 : Memfasilitasi Jamuan Selamatkan Generasi Bangsa Dari Narkoba.	
12.	Kegiatan 30 Juni 2022 : Memfasilitasi Jamuan Rapat PMK.	
13.	Kegiatan 06 Juli 2022: Memfasilitasi Jamuan Kabupaten Bogor	
14.	Kegiatan 19 Juli 2022 : Memfasilitasi Jamuan Kunjungan Para Pembina Dan Perwira Siswa Pendidikan Reguler LXIII Seskoad Tahun Angkatan 2022 Dalam Rangka Kuliah Kerja Lapangan Studi Wilayah Pertahanan Kabupaten Bogor.	
15.	Kegiatan 24 Agustus 2022 : Memfasilitasi Jamuan Pemerintah kabupaten Bogor Menerima Audiensi dengan fasilitator PT. Astra internasional.	
16.	Kegiatan 31 Agustus 2022 : Memfasilitasi Jamuan Bogor Ngaos.	
17.	Kegiatan 30 September 2022 : Memfasilitasi Jamuan Laporan Masyarakat Mengenai Jalan Rusak Parah	
18.	Kegiatan 15 September : Memfasilitasi Jamuan Perawat Bersama Masyarakat.	

19.	Kegiatan 06 Oktober 2022: Memfasilitasi Jamuan rapat capaian kinerja	
20.	Kegiatan 03 Oktober 2022 : Memfasilitasi Jamuan HLM TPID Kabupaten Bogor	

B. BAGIAN ORGANISASI

1. Kegiatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Lingkup koordinasi dan hubungan kerja meliputi seluruh perangkat daerah (Dinas, Badan, dan Kecamatan).

Kegiatan Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dengan menghadirkan Narasumber Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya yang terdiri dari:

- a) Mochamad Arief Wibowo, S.Sos, selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya; dan
- b) P Dika Arlita Kurnia Dewi, S.I.P selaku Asisten Pratama II Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

Kegiatan tersebut dalam rangka upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan pemahaman terhadap Standar pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 76 (tujuh puluh enam) terdiri dari Dinas, Badan. Kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 005/02-Org, tanggal 01 Agustus 2022 yang bertempat di Gedung Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.



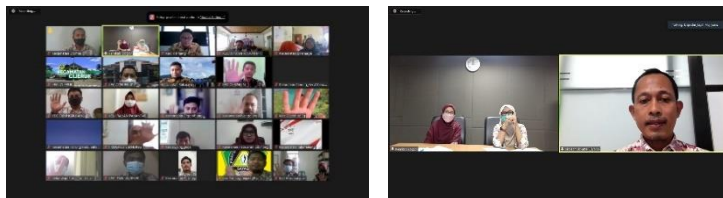
2. Kegiatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Lingkup koordinasi dan fasilitasi bagi seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.

- a. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Bogor ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan upaya meningkatkan Implementasi RB dan SAKIP Pemkab Bogor, dengan tujuan Implementasi RB dan SAKIP di Pemprov Jabar dapat memberikan gambaran kebijakan yang tepat sasaran dan ukuran bagi Pemkab Bogor. Kegiatan tersebut dilakukan Pemkab Bogor oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan BKPSDM secara intens dengan Pemprov Jabar pada tanggal 18 Januari dan 16 September 2022 di Pemprov Jabar.



- b. Desk Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan pada 2 Februari 2022. Sasaran dari kegiatan ini adalah bentuk asistensi dari bagain Organisasi dan upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur pengelola SAKIP pada Perangkat Daerah.



- c. Rakor Rencana Kerja RB dilaksanakan pada 10 Maret dan 15 Maret 2022. Peserta rakor tersebut tersiri dari Tim RB Internal. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
- i. Konsensus pelaksanaan RB;
 - ii. Penyusunan Rencana Aksi pelaksanaan RB;
 - iii. Penyusunan timeline Pelaksanaan RB Tahun 2022.



- d. Rapat Koordinasi Penguatan Tim Penilai Internal RB dengan agenda kegiatan yaitu Penyelarasan Peran Fungsi Tim Internal RB dan SAKIP di Lingkungan Pemkab Bogor, dilaksanakan secara daring pada 25 Maret 2022 dengan menghadirkan narasumber dari Pemprov Jabar.



- e. Audiensi Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto, dan Asisten Deputi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan Evaluasi RB Akuntabilitas Aparatur, Akhmad Hasmy, AK.



- f. Penguatan Implementasi SAKIP dan RB pada seluruh Perangkat Daerah, sebagai tindaklanjut rekomendasi KemenPANRB agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diimplementasikan kepada seluruh Perangkat Daerah. Kegiatan yang dibuka oleh Plt. Bupati Iwan Setiawan ini sekaligus sebagai sarana membangun komitmen bersama untuk melaksanakan RB dan SAKIP sebagai upaya terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada kesempatan tersebut Sekda memaparkan kondisi RB dan SAKIP lingkup Pemkab Bogor, dan menjadi materi diskusi dengan nara sumber Asisten Deputi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan Evaluasi RB Akuntabilitas Aparatur, Akhmad Hasmy, AK, dengan moderator Inspektur, Bpk. Ade Jaya.



- g. Sosialisasi aplikasi E-SAKIP
E-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam

pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP agar mempermudah perangkat daerah dalam menyusun dokumen SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.



C. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

1. Kegiatan Protokol

KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	TARGET	REALISASI FISIK	PRESENTASE
Fasilitasi Keprotokolan	600 Kegiatan	551 Kegiatan	91,83 %

2. Kegiatan Komunikasi Pimpinan

KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	TARGET	REALISASI FISIK	PRESENTASE
1. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Kegiatan	441 Kegiatan	110,25
2. Mempersiapkan Sambutan untuk Kegiatan Pimpinan	400 Naskah	365 Naskah	91,25
3. Menggandakan Bahan Rapat Kegiatan Pimpinan	60 Berkas	67 Berkas	111,67

3. Pendokumentasian Pimpinan

KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	TARGET	REALISASI FISIK	PRESENTASE
1. Fasilitasi Pendokumentasian Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	500 Kegiatan	492 Kegiatan	98,4
2. Notulensi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	100 Laporan	73 Laporan	73
3. Fasilitasi Peliputan Media Terhadap Kegiatan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40 Kegiatan	156 Kegiatan	390
4. Publikasi Kinerja Sekretariat Daerah	12 Media	0	0



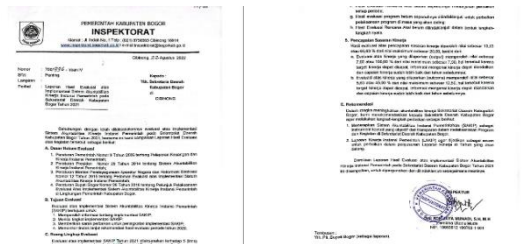
D. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Kegiatan Perencanaan

No	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kegiatan Desk Persiapan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dengan Bappedalitbang	
2.	Rapat Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja lingkup Sekretariat Daerah	
3.	Menerima Kunjungan Kerja dari Bagian Perencanaan Kota Bogor dalam rangka melihat kesesuaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten dengan Kota Bogor	
4.	Desk Penyelarasan Anggaran lingkup Sekretariat Daerah	
5.	Desk Penyusunan Satuan Standar Harga (SSH) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah	

2. Kegiatan Pelaporan

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sekretariat Daerah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dan hasil evaluasi atas implementasi saking perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah mendapatkan nilai tertinggi diantara perangkat daerah lainnya dengan nilai **76,98** atau kategori **BB** dengan ruang lingkup evaluasi meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja.



b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 telah selesai disusun oleh Tim dari Subbag Pelaporan Sekretariat Daerah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan saya telah melakukan pemeriksaan anggaran atas hal-hal yang keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara berkala sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cibinong, 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dr. BURHANUDIN HUSAINI
 Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
PENCAPAIAN DAERAH				
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
Hasil Realisasi Daerah	-	-	-	-
JUMLAH PENCAPAIAN				
BELANJA DAERAH	153.420.011.817,00	141.468.198.308,00	92,26%	132.843.448.873,00
BELANJA OPERASI	148.118.078.263,00	133.686.882.208,00	90,25%	118.193.878.883,00
1. Belanja Pegawai	62.255.205.250,00	57.723.984.558,00	92,72%	57.794.318.724,00
Belanja Barang	60.407.918.004,00	55.632.897.851,00	92,20%	52.448.628.699,00
LOM	-	-	-	-
3. Belanja Hibah	22.365.000.000,00	20.130.000.000,00	90,11%	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
4. Belanja Bantuan Operasional	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	148.118.078.263,00	133.686.882.208,00	90,25%	118.193.878.883,00
BELANJA MODAL	5.301.933.554,00	7.781.316.100,00	146,81%	12.649.570.190,00